



RENCANA KERJA

**Direktorat
Bina Pengelolaan dan
Pemulihan Ekosistem**

2024

Cekakak jawa (*Halycon cyanoventris*)
Dok Taman Kehati Sumedang



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN DAN EKOSISTEM
Alamat: Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 14
Jl. Jend. Gatot Subroto, Telp. (021) 5746336, JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM
Nomor: SK.25/BPPE/TU/12/2023

TENTANG

RENCANA KERJA
DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM
TAHUN 2024

DIREKTUR
BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja;
- b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem tentang Rencana Kerja Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan-;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
15. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM TAHUN 2024

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2024 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Rencana Kerja Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan dan kegiatan pembangunan bidang konservasi ekosistem esensial.
- (3) Rencana Kerja Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Tahun 2024 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 5 Desember 2023

Direktur,



Dr. H. Ammy Nurwati, MM
NIP. 19690821 1994032001

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM
Nomor: SK.25/BPPE/TU/12/2023

TENTANG
RENCANA KERJA
DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN DIREKTUR BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM.....	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi.....	3
C. Struktur Organisasi Dan Sumber Daya Manusia.....	5
II. CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PROGNOSIS CAPAIAN TAHUN ANGGARAN 2023	7
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 Dan Prognosis Tahun 2023	7
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 Dan Prognosis Tahun 2023.....	10
III. RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024.....	12
A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK Dan Prioritas Nasional	12
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan Dan Elemen Kegiatan Tahun 2024.....	14
IV. PENUTUP	16
V. LAMPIRAN	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	6
Gambar 3. Distribusi Pegawai Direktorat BPPE Tahun 2023.....	6
Gambar 4. Target Kinerja Direktorat BPPE Tahun 2020-2024	7
Gambar 5. Alokasi Anggaran Ditjen KSDAE Mendukung Prioritas Nasional TA 2024.....	12

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target & Capaian Kinerja Tahun 2022.....	8
Tabel 2. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2023.....	9
Tabel 3. Realisasi Anggaran Direktorat BPPE Tahun 2022	10
Tabel 4. Prognosis Realisasi Anggaran Direktorat BPPE Tahun 2023	11
Tabel 6. Struktur Proyek Prioritas Nasional pada Direktorat BPPE Tahun 2024.....	13
Tabel 7. Alokasi Target & Anggaran per Kegiatan Tahun 2024	14

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada rencana dan sasaran strategis nasional tahun 2020-2024, prioritas pembangunan nasional, pagu indikatif, memuat kebijakan, dan kegiatan pembangunan kawasan konservasi yang menjadi pedoman seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

Rencana Kerja disusun sebagai salah satu bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan, khususnya bidang pengelolaan dan pemulihan ekosistem. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dokumen perencanaan tahunan ini akan berkontribusi pada upaya mendukung upaya-upaya pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta sasaran Pembangunan nasional yang terkait lainnya.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib pelaporan. Rencana Kerja ini merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, sehingga tujuan dan sasaran strategis Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Tahun 2020-2024 dapat tercapai.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan ini dan penghargaan atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua untuk dapat berpartisipasi di bidang tugas kita masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Jakarta, 5 Desember 2023
Direktur Bina Pengelolaan dan
Pemulihan Ekosistem,



D. Ir. Ammy Nurwati, MM
NIP. 19690821 1994032001

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024, diharapkan target-target sasaran akhir akan tercapai. Tahun 2024 juga diharapkan akan menjadi landasan yang kuat untuk melanjutkan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025- 2029. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 telah ditetapkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) menjadi pedoman/acuan dalam pemutakhiran dan penyusunan rencana kerja unit kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan menjadi arahan dalam hal penentuan kebijakan dan strategi pembangunan Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelaksanaan pembangunan nasional masih mengalami tekanan, Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian Covid19, sedangkan pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap untuk mencapai *herd immunity* dan terbukti mampu mengendalikan penyebaran pandemi COVID19 menuju pencapaian *herd immunity*. Pelaksanaan vaksinasi, pemulihan daya beli masyarakat, perbaikan investasi, serta pertumbuhan ekspor yang tinggi memberikan kontribusi pada pemulihan perekonomian yang relatif cepat. Pada awal tahun 2022, berbagai upaya pemulihan ekonomi global dan peredaman *scarring effect* pasca pandemi kembali menghadapi tantangan berat akibat konflik geopolitik Rusia-Ukraina.

Upaya pemulihan pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi menjadi agenda bersama seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pembangunan sejak tahun 2023 dan akan diakselerasi pada tahun 2024. Aktivitas perekonomian di tahun 2023 diperkirakan sudah kembali pada kondisi normal seiring dengan penanganan intensif di bidang kesehatan untuk mencapai *herd immunity* pada tahun 2022. Transformasi ekonomi dilaksanakan melalui tiga pilar yaitu, (a) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, (b) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta (c) perluasan akses dan kesempatan kerja. Proses penyusunan RKP dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Sementara itu secara substantif RKP disusun dengan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif*, dan *Spasial* (THIS).

Merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, telah ditetapkan Visi Pembangunan Tahun 2024, yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema RKP Tahun 2024 berfokus pada percepatan dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mempertimbangkan capaian RPJMN 2020-2024, arahan presiden, hasil evaluasi pembangunan Tahun 2022, evaluasi kebijakan Tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 difokuskan pada strategi pencapaian target pembangunan jangka menengah melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional-PN) yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.



Gambar 1. Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

Mengacu pada RPJMN, Renstra Ditjen KSDAE dan Renstra KLHK 2020-2024, Direktorat BPPE menjadi bagian dan berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional melalui dukungan terhadap capaian Prioritas Nasional. Direktorat BPPE mendukung capaian Prioritas Nasional (PN) 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk

Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dan PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Indikator kinerja yang harus dicapai oleh Direktorat BPPE berupa Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi seluas 43 Juta Hektar, (2) Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya sebanyak 55 Unit KEE, serta (3) Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi seluas 200.000 Hektar.

Dalam pencapaian target kinerja, khususnya terkait Prioritas Nasional, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan tersebut diimplementasikan dengan (1) menjaga kesinambungan melalui penyesuaian Prioritas Nasional dengan Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Major Project (MP); (3) menjadikan konsep pelaksanaan kegiatan dilakukan secara spasial dan didukung oleh multi pihak; dan (4) mengintegrasikan pendanaan pembangunan serta sinergi dan keterpaduan pelaksanaan antara Satuan Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satker serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), yang selanjutnya dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024.

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan transformasi untuk peran baru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menuntun perubahan arsitektur program dan memperkuat pesan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rangka mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan antara lain dengan: (1) Penyelesaian Revisi UU Nomor 5/1990 sebagai salah satu upaya internalisasi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang diturunkan melalui Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri untuk mendorong kemudahan berusaha namun tetap sesuai dengan prinsip pengelolaan KSDAHE yang berkelanjutan, (3) Multi usaha Kehutanan untuk menciptakan keseimbangan industri pengolahan bahan baku dan

mendorong *multiplier effect*, dan (4) Sirkuler Ekonomi untuk mentransformasikan pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan wirausahawan kreatif.

Dalam rangka pengarusutamaan pelestarian keanekaragaman hayati diperlukan beberapa strategi agar tercapai keseimbangan dan keterpaduan dalam pembangunan berkelanjutan, antara lain: (1) Menyusun strategi perencanaan, pengelolaan, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pengendaliannya; (2) Melakukan pengendalian pembangunan dan konservasi dengan tolok ukur keanekaragaman hayati; (4) Meningkatkan pengelolaan di dalam dan di luar kawasan hutan yang penting bagi keberadaan keanekaragaman hayati; (6) Meningkatkan bimbingan dan pembinaan kepada pemerintah daerah termasuk dalam penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Daerah dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah; dan (7) Mendukung langkah kerja pelaksanaan konvensi internasional di bidang keanekaragaman hayati. Mencapai keseimbangan dan keterpaduan dalam pembangunan berkelanjutan adalah tantangan kompleks yang memerlukan komitmen jangka panjang dan kerja sama lintas sektor dan lintas negara. Dengan strategi yang tepat, pembangunan berkelanjutan dapat menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 1 Juli 2021, bahwa ada perubahan nomenklatur organisasi dari Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (Direktorat BPPE) menjadi Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem (Direktorat BPPE). Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina pengelolaan dan pemulihan ekosistem, serta pembinaan pengelolaan ekosistem Esensial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Direktorat BPPE menyelenggarakan fungsi :

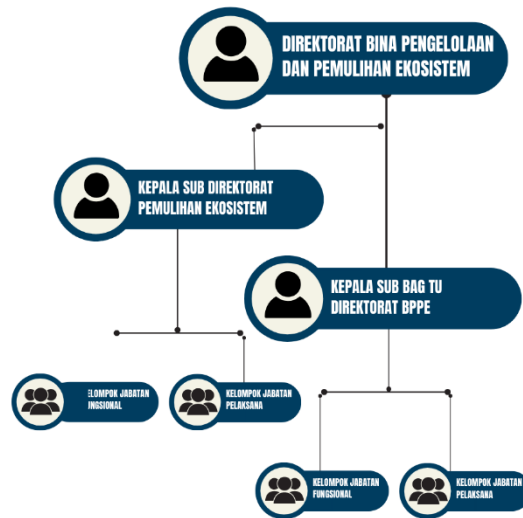
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
4. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemolaan, pemetaan dan penetapan ekosistem esensial, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial, serta perencanaan dan pemulihan ekosistem pada kawasan ekosistem esensial, kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

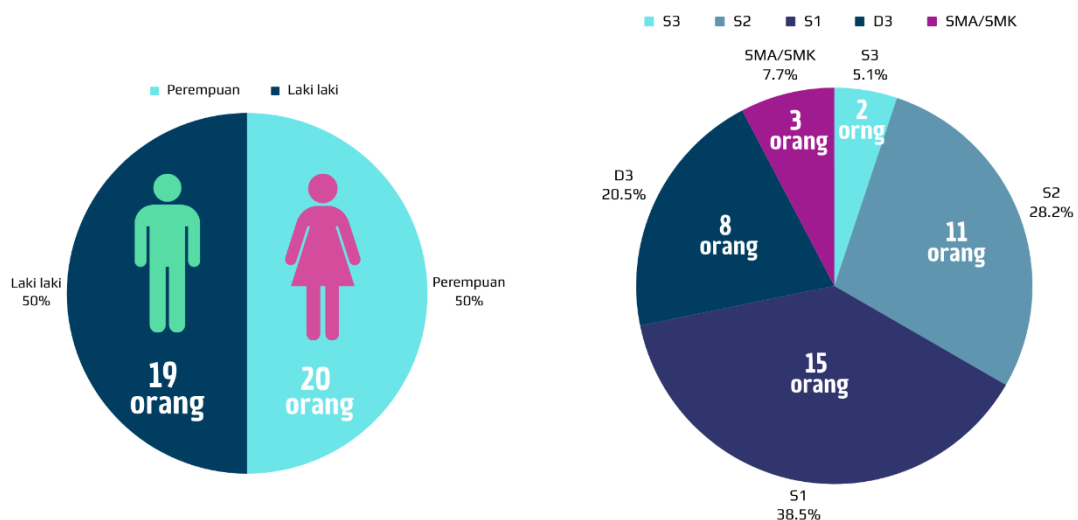
Direktorat BPPE merupakan bagian dari Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Direktorat BPPE Terdiri atas : 1) Subdirektorat Pemulihan Ekosistem; 2) Subbagian Tata Usaha; 3) Kelompok Jabatan Fungsional, seperti diilustrasikan pada Gambar 2. Dalam melaksanakan kegiatan di lapangan, Direktorat BPPE memiliki mitra kerja pelaksana teknis yang terdiri atas Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kehutanan di daerah, serta UPT Balai Besar Konservasi

Sumber Daya Alam/Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA/BKSDA) dan Taman Nasional (TN) di bawah komando Ditjen KSDAE di samping Pusat Pengelolaan Ekoregion di bawah Sekretariat Jenderal KLHK.



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem

Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem merupakan Eselon II di bawah Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jumlah pegawai PNS aktif sebanyak 31 orang, P3K sebanyak 4 orang, dan PPNPN sebanyak 4 orang sehingga total seluruh pegawai berjumlah 39 orang. Distribusi jenis kelamin dan pendidikan terakhir pegawai pada Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem disajikan pada gambar berikut



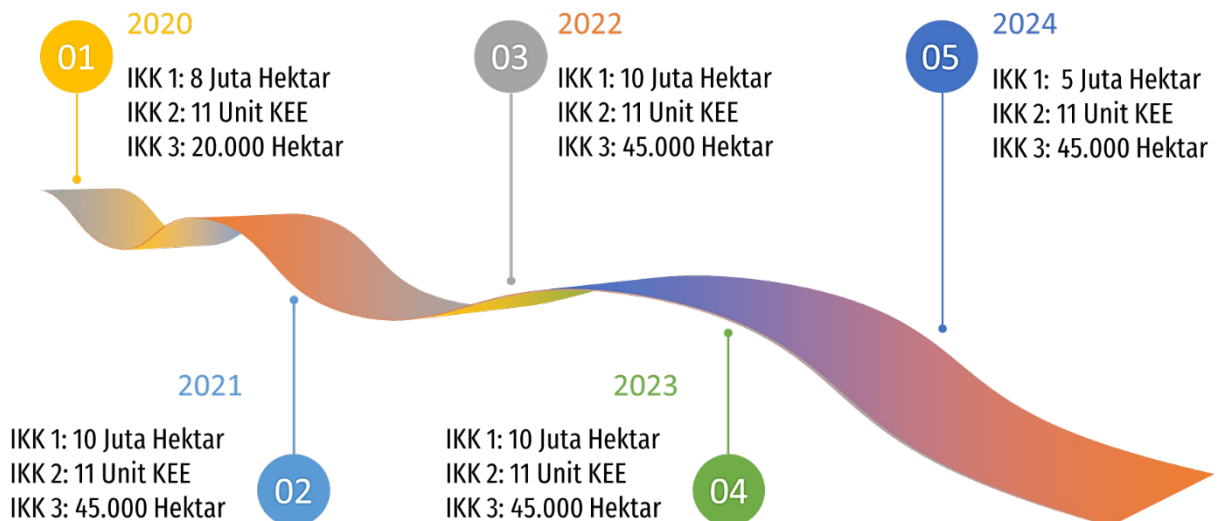
Gambar 3. Distribusi Pegawai Direktorat BPPE Tahun 2023

II. CAPAIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PROGNOSIS CAPAIAN TAHUN ANGGARAN 2023

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem mendukung capaian Prioritas Nasional (PN) 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, dan PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Indikator kinerja atau IKK yang harus dicapai oleh Direktorat BPPE berupa (1) Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi seluas 43 Juta Hektar, (2) Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya sebanyak 55 Unit KEE, serta (3) Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi seluas 200.000 Hektar.



Gambar 4. Target Kinerja Direktorat BPPE Tahun 2020-2024

Capaian indikator kinerja Tahun 2022, secara umum, sudah cukup baik dan mendekati ekspektasi pada Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Indikator kinerja Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi seluas 43 Juta Hektar tercapai seluas 8.059.968,28 hektar atau 80,6% dari target Tahun 2022, (2) Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya sebanyak 55 Unit KEE tercapai sebanyak 11 Unit KEE atau 100% terhadap target Tahun 2022, serta (3) Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi seluas 200.000 Hektar tercapai seluas 72.114,45 hektar atau melebihi target Tahun 2022 (Tabel 1).

Tabel 1. Target & Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022	
				Vol/Sat	%
1	Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kehati tinggi secara partisipatif di luar Kaw. Konservasi	10 Juta Ha	8,059 Juta ha	80,6
2	Terselenggaranya pembinaan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial yang efektif	Jumlah KEE yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	11 Unit KEE	11 Unit KEE	100
3	Meningkatnya pemulihan ekosistem di kawasan konservasi	Luas ekosistem yang dipulihkan	45.000 ha	72.114,45 ha	100

Beberapa hal yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian indikator kinerja di Tahun 2022 yaitu:

1. Pengalaman dan *best practice* pelaksanaan kegiatan di tingkat UPT Ditjen KSDAE diantaranya dari Balai KSDA Kalimantan Timur dan Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. Kedua UPT Ditjen KSDAE menyampaikan pentingnya membangun relasi dan koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, perguruan tinggi maupun dunia usaha. Hal ini penting untuk memberikan dan mendapatkan pemahaman yang sama tentang kegiatan inventarisasi kehati ini. Selain itu, pada setiap tahapan kegiatan inventarisasi dan verifikasi kehati sebaiknya selalu melibatkan para pemangku kepentingan tersebut. Pelibatan ini akan membantu dan memudahkan proses pengumpulan data dan informasi di lapangan.
2. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran para pihak akan pentingnya upaya pelestarian KEE di wilayahnya;
3. Koordinasi dan partisipasi aktif para pihak dalam pengelolaan KEE, sehingga berdampak pada pengelolaan KEE; dan Dukungan pendanaan para pihak yang memiliki komitmen dalam upaya pengelolaan KEE.

Prognosis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Pengalaman, *best practice*, dan masukan dari UPT Ditjen KSDAE selama pelaksanaan kegiatan di Tahun 2022 menjadi masukan penting dalam Upaya pencapaian target di Tahun 2023. Beberapa hal yang menjadi tindak lanjut diantaranya untuk kegiatan inventarisasi kehati, Direktorat BPPE telah melaksanakan Bimbingan Teknis inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi. Pada kegiatan ini tim pelaksana Balai Besar/Balai KSDA diberikan pengetahuan untuk

pelaksanaan kegiatan, diantaranya teknik analisis satwaliar tertentu dan teknik analisis spasial. Selain itu, dalam kegiatan bimbingan teknis juga diberikan kesempatan bagi para pelaksana lapangan untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan saling menceritakan best practice pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya masing-masing. Hal yang serupa juga dilakukan untuk indikator kinerja lainnya.

Pada IKK pembinaan pengelolaan KEE yang dilakukan antara lain memperkuat koordinasi dan komunikasi antara UPT BBKSDA/ BKSDA dengan para pihak (Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta, LSM, dan Masyarakat) dalam upaya peningkatan efektivitas pengelolaan KEE. Untuk kegiatan pemulihan ekosistem, yang dilakukan diantaranya meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan para pihak yang memiliki kepentingan guna percepatan pelaksanaan pemulihan ekosistem di tingkat tapak. Stakeholder potensial yang terkait dengan pemulihan ekosistem diantaranya adalah Ditjen PDASRH, Ditjen PPKL, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, BRGM, NGO, dunia usaha dan sebagainya. Sinkronisasi dilakukan terhadap integrasi perencanaan pemulihan ekosistem, penanganan prakondisi lokasi pemulihan ekosistem yang belum clear and clean, penanganan sumber-sumber penyebab kerusakan kawasan lainnya (sampah, kebocoran limbah B3, *vesel grounding*). Hal-hal di atas sangat mendukung upaya percepatan pencapaian kinerja Tahun 2023, sehingga prognosis capaian kinerja 2023 disusun sebagai berikut.

Tabel 2. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2020-2024	Capaian 2020-2022	Target 2023	Prognosis 2023
1	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kehati tinggi secara partisipatif di luar Kaw. Konservasi	43.000.000 ha	23.655.320 ha	10.000.000 ha	10.000.000 ha
2	Jumlah KEE yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	55 Unit KEE	33 Unit KEE	11 Unit KEE	11 Unit KEE
3	Luas ekosistem yang dipulihkan	200.000 ha	142.641,65 ha	45.000 ha	45.000 ha

Sampai dengan 15 Desember 2023, capaian seluruh indikator kinerja pada Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem telah mendekati target yang diharapkan. Indikator kinerja Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi tercatat tercapai seluas 14.578.360,67 hektar atau 80,6% dari target Tahun 2022, (2) Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya tercapai sebanyak 10 Unit KEE, serta (3) Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi seluas 200.000 Hektar tercapai seluas 45.422,91 hektar.

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Anggaran Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem tahun 2022 untuk 3 (tiga) kegiatan pokok Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem sebesar Rp. 2.487.975.000,- dengan realisasi sebesar Rp.2.487.456.393,- atau 99,98%. Berdasarkan data penyerapan anggaran sebesar **99,98%** dan capaian kinerja sebesar **110%**, maka pelaksanaan kinerja dan anggaran Direktorat BPPE tahun 2022 berjalan **efisien**, seperti tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Direktorat BPPE Tahun 2022

No	Output	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Nominal	%	
1	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	601.375.000	601.293.501	99,99	81.499
2	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1.245.700.000	1.245.443.525	99,98	256.475
3	Luas ekosistem yang dipulihkan	640.900.000	640.719.367	99,97	180.633
Total		2.487.975.000	2.487.456.393	99,98	518.607

Untuk Tahun 2023, Anggaran Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem untuk 3 (tiga) kegiatan pokok sebesar Rp. 5.600.000.000, - Sampai dengan 30 November 2023 adalah sebesar Rp.4.853.406.454,- atau 86,67% dari pagu yang dialokasikan. Berdasarkan perencanaan kegiatan bulan Desember Tahun 2023, prognosis capaian

realisasi anggaran tahun 2023 setidaknya akan mencapai Rp. 5.598.612.644,- atau 99,97% dari alokasi.

Tabel 4. Prognosis Realisasi Anggaran Direktorat BPPE Tahun 2023

No	<i>Output</i>	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d 30 November 2023	Prognosis (Rp)
			Nominal	
1	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	900.000.000	890.000.000	899.794.948
2	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1.100.000.000	1.090.000.000	1.099.697.582
3	Luas ekosistem yang dipulihkan	3.600.000.000	3.590.000.000	3.599.120.114
Total		5.600.000.000	5.480.000.000	5.598.612.644

III. RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024

A. Strategi dalam Mendukung Program KLHK dan Prioritas Nasional

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki peran penting dalam mendukung prioritas nasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Sejak tahun 2020, seluruh program dan kegiatan KLHK diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) yang telah dicanangkan dalam RPJMN tahun 2020-2024. Pembangunan 5 tahunan yang pada tahun 2024 memasuki tahun terakhir menjadi penentu keberhasilan pencapaian target dengan arahan prioritas nasional yang telah ditetapkan.



Gambar 5. Alokasi Anggaran Ditjen KSDAE Mendukung Prioritas Nasional TA 2024

Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang ada, sebagian besar anggaran kegiatan KLHK tahun 2024 dialokasikan untuk mendukung 4 (empat) PN yaitu: (PN 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (PN 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (PN 3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; dan (PN 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan sebesar Rp.3.549.476.472.000,- untuk mendukung Prioritas Nasional Tahun Anggaran 2024. Dengan rincian per PN, yaitu: PN 1 sebesar Rp.522.462.838.000,-, PN 2 sebesar Rp.39.130.895.000,-, PN 3 sebesar Rp.498.572.438.000,- dan PN 6 sebesar Rp.3.549.476.472.000,-.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional, pada tahun 2024 Direktorat Jenderal KSDAE mengalokasikan sebesar Rp.534.110.813.000,- dari total alokasi anggaran sebesar Rp.1.773.960.108.000,-. Alokasi tersebut digunakan untuk mendukung 3 PN, yaitu PN 1,

PN 2 dan PN 6. Sebagian besar dari alokasi PN tersebut digunakan untuk mendukung PN 1 dan PN 6 dan sisanya untuk PN 2.

Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem mendukung Prioritas Nasional 1 dan Prioritas Nasional 6. Pada Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 1, yang terkait dengan Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem adalah meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator luas minimal kawasan berfungsi lindung.. Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem bertugas untuk mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan, dimana pelaksana teknis lapangan adalah Balai Besar/Balai KSDA dan Taman Nasional.

Tabel 5. Struktur Proyek Prioritas Nasional pada Direktorat BPPE Tahun 2024

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Rincian Output (RO)	Pagu Alokasi (x Rp.1.000)
Prioritas Nasional 1				
Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (kumulatif)	Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar KK	7.619.951
		Perlindungan & Pengamanan Kawasan Lindung secara Partisipatif	Pemulihan Ekosistem di KK Konservasi	28.135.592
Prioritas Nasional 6				
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	Dokumen Register Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	800.000
			Kebijakan Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	800.000
			KEE yang difasilitasi peningkatan Efektivitas Pengelolaan	1.200.000
			Kebijakan Pemulihan Ekosistem di KK dan Ekosistem Esensial	3.500.000

Prioritas Nasional 6 adalah Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6 yang terkait dengan Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem adalah Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan secara nasional. Direktorat BPPE memiliki tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan yang terkait pencapaian sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional. Struktur Proyek Prioritas Nasional terdiri atas Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas Nasional (Pro PN), dan Rincian Output.

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode implementasi RPJMN 2020-2024. Untuk Tahun 2024, sejalan dengan Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2024, target Indikator kinerja pada Direktorat BPPE yaitu (1) Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati di luar Kawasan Konservasi seluas 9.350.000 hektar, (2) Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya sebanyak 11 Unit KEE, serta (3) Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi seluas 12.812 hektar.

Direktorat Jenderal KSDAE mengalokasikan target dan pagu anggaran Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Surat Direktur Jenderal KSDAE No. S.1039/KSDAE /SET.3/REN.2/10/2023, tanggal 2 Oktober 2023, perihal Penyusunan RKA/KL Alokasi Anggaran Lingkup Ditjen KSDAE TA 2024. Khusus untuk Direktorat BPPE, anggaran per kegiatan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6. Alokasi Target & Anggaran per Kegiatan Tahun 2024

Kegiatan	KRO	RO	Target 2024	Pagu Alokasi (x Rp. 1000)	Pelaksana Teknis
Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial	QMA- Data dan Informasi Publik	Dokumen Register Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	1 Dokumen	800.000	Dit BPPE
	PBJ- Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Kebijakan Ekosistem Esensial yang Ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	1 Dokumen	800.000	Dit BPPE
	QDB- Fasilitasi dan	KEE yang difasilitasi untuk peningkatan	11 Lembaga	1.200.000	Dit BPPE

Kegiatan	KRO	RO	Target 2024	Pagu Alokasi (x Rp. 1000)	Pelaksana Teknis
	Pembinaan Lembaga	Efektivitas Pengelolaan			
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	9.350.000 ha	7.619.951	48 UPT KSDA
Pemulihan Ekosistem	ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Kebijakan Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi da ABKT	1 Dokumen	3.500.000	Dit BPPE
	BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Forest Program VI	1 Lembaga	5.000.000	BBKSDA Sumatera Utara
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Area IKN yang dilakukan Pemulihan Ekosistem	1.200 ha	1.000.000	BKSDA Kalimantan Timur
	REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi, Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT	12.380 ha	28.135.592	74 UPT KSDA dan Taman Nasional

Kegiatan peningkatan efektivitas pengelolaan KEE yang selanjutnya menjadi target IKK 2 Direktorat BPPE, dilaksanakan oleh Direktorat BPPE dengan dukungan UPT Balai Besar/Balai KSDA serta melibatkan seluruh stake holder yang terkait antara lain Pemerintah Daerah, akademisi, LSM, pihak swasta, dan tokoh masyarakat setempat. Terdapat 11 (sebelas) unit KEE target pada tahun 2023, yaitu

1. Koridor Bener Meriah, Provinsi Aceh
2. Koridor Harimau dan Satwa Liar lainnya, Provinsi Sumatera Barat
3. ABKT Hutan Lindung POTA, Kab. Manggarai Timur, Provinsi NTT
4. ABKT Pulau Masakambing, Provinsi Jawa Timur
5. ABKT Pulau Buano, Provinsi Maluku
6. Taman Kehati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
7. Taman Keanekaragaman hayati Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan
8. Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan
9. KEE Mangrove Lepar Pongok, Provinsi Bangka Belitung
10. KEE Mangrove Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah
11. KEE Mangrove Pantai Cemara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi

IV. PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat BPPE Tahun 2024 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang pembinaan pengelolaan dan pemulihan ekosistem tahun 2024. Rencana Kerja ini merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 lingkup Direktorat BPPE. Namun demikian, apabila sekiranya dibutuhkan penyempurnaan sebagai akibat dari adanya penyesuaian dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, maka dokumen ini dapat disesuaikan kembali di kemudian hari.

Perlu diperhatikan bahwa Rencana Kerja Direktorat BPPE Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta mencakup kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang BPPE. Tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, kegiatan beserta seluruh indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaiannya, perlu mendapat perhatian secara serius agar mandat yang diberikan oleh negara dan masyarakat dapat dicapai secara optimal dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab Direktorat BPPE kepada masyarakat.

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian secara serius adalah adanya kemungkinan adanya perbedaan antara kondisi eksisting regulasi dan kelembagaan di lingkungan Direktorat BPPE dengan kebutuhan nyata untuk memenuhi mandat yang telah diberikan. Hal-hal tersebut perlu mendapat prioritas dalam penanganannya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip relevan, efektif, efisien, fleksibel, dan bermanfaat.

Direktur Bina Pengelolaan
dan Pemulihan Ekosistem,



Dr. Ir. Ammy Nurwaty, MM.
NIP. 19690821 199403 2 001

V. LAMPIRAN

Rincian Kegiatan dan Anggaran Direktorat BPPE Tahun 2024

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Vol	Sat	Harga Sat	Jumlah Biaya
	DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM				8,056,640,000
029.05.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup				2,800,000,000
6743	Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial				2,800,000,000
6743.PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian			800,000,000
	Lokasi : DKI JAKARTA				
6743.PBJ.0 02	Kebijakan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	1.0 Rekomendasi Kebijakan			800,000,000
051	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT				800,000,000
A	<i>Penyusunan Pedoman Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT</i>				109,850,000
521211	<u>Belanja Bahan</u>				8,220,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- ATK	1	KEG	1,580,000	1,580,000
	- Konsumsi rapat (eselon I lain dan stakeholder lainnya)	60	OR/KL	69,000	4,140,000
	- Pencetakan	50	EKS	50,000	2,500,000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>				11,800,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honor Moderator/Fasilitator Non KLHK	4	OK	700,000	2,800,000
	- Honor Narasumber Non KLHK	10	OJ	900,000	9,000,000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>				30,080,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	> Perjalanan Dinas dalam rangka Penyusunan Pedoman Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan A				30,080,000
	- Tiket dan Biaya Transportasi (1 orang x 4 kali)	4	OK	3,250,000	13,000,000
	- Biaya Penginapan (1 orang x 3 malam x 4 kali)	12	OHK	850,000	10,200,000
	- Uang Harian (1 orang x 4 hari x 4 kali)	16	OHK	430,000	6,880,000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>				59,750,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting Fullday	50	OH	490,000	24,500,000

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL		Vol	Sat	Harga Sat	Jumlah Biaya
	-	Uang Harian Rapat	50	OH	105,000	5,250,000
	-	Uang Transport Rapat	50	OH	600,000	30,000,000
B	<i>Bimbingan Teknis / Koordinasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar,Taman Kehati, dan ABKT</i>					299,850,000
521211	<u>Belanja Bahan</u>					30,950,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	-	ATK	1	KEG	2,670,000	2,670,000
	-	Personal Use	100	UNIT	200,000	20,000,000
	-	Konsumsi rapat (eselon II lain dan stakeholder lainnya)	120	OR/KL	69,000	8,280,000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>					10,200,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	-	Honor Narasumber non KLHK	6	OJ	900,000	5,400,000
	-	Honor Moderator/Fasilitator non KLHK	2	OK	700,000	1,400,000
	-	Honor Narasumber Pakar / Ahli	2	OJ	1,700,000	3,400,000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>					187,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	>	Perjalanan Dinas dalam rangka bimtek pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar,Taman Kehati, dan ABKT				187,000,000
	-	Tiket dan Biaya Transportasi (1 orang x 20 kali)	20	OK	4,350,000	87,000,000
	-	Biaya Penginapan (1 orang x 3 malam x 20 kali)	60	OHK	1,000,000	60,000,000
	-	Uang Harian (1 orang x 4 hari x 20 kali)	80	OHK	500,000	40,000,000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>					71,700,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	-	Paket Meeting Fullday	60	OH	490,000	29,400,000
	-	Uang Transport Rapat	60	OH	600,000	36,000,000
	-	Uang Harian Rapat	60	OH	105,000	6,300,000
C	<i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar,Taman Kehati, dan ABKT</i>					163,300,000
521211	<u>Belanja Bahan</u>					18,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	-	ATK	1	KEG	2,000,000	2,000,000
	-	Pencetakan Buku	40	BUKU	400,000	16,000,000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>					97,500,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	>	Perjalanan Dinas dalam rangka Monev pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar,Taman Kehati, dan ABKT				97,500,000
	-	Tiket dan Biaya Transportasi (1 orang x 10 kali)	10	OK	4,750,000	47,500,000

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Vol	Sat	Harga Sat	Jumlah Biaya
	- Biaya Penginapan (1 orang x 3 malam x 10 kali)	30	OHK	1,000,000	30,000,000
	- Uang Harian (1 orang x 4 hari x 10 kali)	40	OHK	500,000	20,000,000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.182-Jakarta VII)				47,800,000
	- Uang transport Rapat	40	OH	600,000	24,000,000
	- Paket Meeting Fullday	40	OH	490,000	19,600,000
	- Uang Harian Rapat	40	OH	105,000	4,200,000
D	<i>Implementasi Kerjasama/Komitmen Internasional terkait Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, Taman Kehati, dan ABKT</i>				227,000,000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.182-Jakarta VII)				18,800,000
	- ATK	1	KEG	1,300,000	1,300,000
	- Personal Use	50	UNIT	200,000	10,000,000
	- Konsumsi rapat (eselon I lain dan stakeholder lainnya)	100	OR/KL	75,000	7,500,000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.182-Jakarta VII)				8,400,000
	- Honor Narasumber Non KLHK	4	OJ	900,000	3,600,000
	- Honor Narasumber Pakar / Ahli	2	OJ	1,700,000	3,400,000
	- Honor Moderator/Fasilitator non KLHK	2	OK	700,000	1,400,000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.182-Jakarta VII)				60,000,000
	> Perjalanan Dinas dalam rangka Implementasi Kerjasama / Komitmen Internasional terkait pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Koridor Hidupan Liar, ABKT				60,000,000
	- Tiket dan Biaya Transportasi (1 orang x 8 kali)	8	OK	4,200,000	33,600,000
	- Biaya Penginapan (1 orang x 2 malam x 8 kali)	16	OHK	900,000	14,400,000
	- Uang Harian (1 orang x 3 hari x 8 kali)	24	OHK	500,000	12,000,000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.182-Jakarta VII)				59,800,000
	- Paket Meeting Fullday	40	OH	490,000	19,600,000
	- Uang Harian Rapat	40	OH	105,000	4,200,000
	- Uang Transport Rapat	60	OH	600,000	36,000,000
524211	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri</u> (KPPN.182-Jakarta VII)				80,000,000
	- Perjalanan Dinas menghadiri pertemuan internasional terkait pengelolaan lahan basah	2	OT	40,000,000	80,000,000

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Vol	Sat	Harga Sat	Jumlah Biaya
6743.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]	1.0 Lembaga, Unit Kerja, Tim			1,200,000,000
	Lokasi : DKI JAKARTA				
6743.QDB. 001	KEE yang difasilitasi untuk peningkatan Efektivitas Pengelolaan	1.0 Lembaga			1,200,000,000
051	Fasilitasi Pengelolaan KEE/Koridor Hidupan Liar/Taman Kehati/ABKT				1,200,000,000
A	<i>Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Bener Meriah BKSDA NAD</i>				150,000,000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>				150,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
-	Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Bener Meriah BKSDA NAD	1	KEG	150,000,000	150,000,000
B	<i>Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Harimau dan Satwa Liar lainnya Kab Solok dan Dharmasraya, BKSDA Sumatera Barat</i>				150,000,000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>				150,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
-	Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Harimau dan Satwa Liar lainnya Kab Solok dan Dharmasraya, BKSDA Sumatera Barat	1	KEG	150,000,000	150,000,000
C	<i>Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Pantai Cemara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, BKSDA Jambi</i>				100,000,000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>				100,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
-	Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Pantai Cemara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, BKSDA Jambi	1	KEG	100,000,000	100,000,000
D	<i>Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Muara Enim BKSDA Sumatera Selatan</i>				100,000,000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>				100,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Vol	Sat	Harga Sat	Jumlah Biaya
-	Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Muara Enim BKSDA Sumatera Selatan	1	KEG	100,000,000	100,000,000
E	<i>Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Lepar Pongok BKSDA Sumatera Selatan</i>				100,000,000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>				100,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
-	Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Lepar Pongok BKSDA Sumatera Selatan	1	KEG	100,000,000	100,000,000
F	<i>Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Taman Kehati Kabupaten Bandung BBKSDA Jawa Barat</i>				100,000,000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>				100,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
-	Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Taman Kehati Kabupaten Bandung BBKSDA Jawa Barat	1	KEG	100,000,000	100,000,000
G	<i>Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Kabupaten Rembang BKSDA Jawa Tengah</i>				100,000,000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>				100,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
-	Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Mangrove Kabupaten Rembang BKSDA Jawa Tengah	1	KEG	100,000,000	100,000,000
H	<i>Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial ABKT Pulau Masakambing BBKSDA Jawa Timur</i>				100,000,000
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>				100,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
-	Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial ABKT Pulau Masakambing BBKSDA Jawa Timur	1	KEG	100,000,000	100,000,000
I	<i>Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Taman Keanekaragaman hayati Kota</i>				100,000,000

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Vol	Sat	Harga Sat	Jumlah Biaya
	Banjar Baru BKSDA Kalimantan Selatan				
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				100,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Fasilitas Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Taman Keanekaragaman hayati Kota Banjar Baru BKSDA Kalimantan Selatan	1	KEG	100,000,000	100,000,000
J	Fasilitas Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial ABKT Hutan Lindung POTA, Kab. Manggarai Timur BBKSDA NTT				100,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				100,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Fasilitas Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial ABKT Hutan Lindung POTA, Kab. Manggarai Timur BBKSDA NTT	1	KEG	100,000,000	100,000,000
K	Fasilitas Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial ABKT Pulau Buano BKSDA Maluku				100,000,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				100,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Fasilitas Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial ABKT Pulau Buano BKSDA Maluku	1	KEG	100,000,000	100,000,000
6743.QMA	Data dan Informasi Publik[Base Line]	1.0 layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi			800,000,000
	Lokasi : DKI JAKARTA				
6743.QMA.001	Dokumen Register Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	1.0 dokumen			800,000,000
051	Verifikasi Potensi Kawasan dengan Kehati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi				300,000,000
A	Bimbingan Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Keanekaragaman Hayati Tinggi				137,910,000
521211	Belanja Bahan				21,110,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- ATK	1	KEG	2,210,000	2,210,000
	- Personal Use	60	UNIT	200,000	12,000,000
	- Konsumsi rapat (eselon II lain dan stakeholder lainnya)	100	OR/KL	69,000	6,900,000
522141	Belanja Sewa				7,500,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Vol	Sat	Harga Sat	Jumlah Biaya
	- Sewa Kendaraan	3	UNIT	2,500,000	7,500,000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.182-Jakarta VII)				10,700,000
	- Honor Narasumber Non KLHK	2	OJ	900,000	1,800,000
	- Honor Pakar/Ahli Non KLHK	4	OJ	1,700,000	6,800,000
	- Honor Moderator/Fasilitator non KLHK	3	OK	700,000	2,100,000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.182-Jakarta VII)				32,850,000
	> Perjalanan dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Keanekaragaman Hayati Tinggi				32,850,000
	- Tiket dan Biaya Transportasi (1 orang x 5 kali)	5	OK	2,070,000	10,350,000
	- Biaya Penginapan (1 orang x 3 malam x 5 kali)	15	OHK	900,000	13,500,000
	- Uang Harian (1 orang x 4 hari x 5 kali)	20	OHK	450,000	9,000,000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.182-Jakarta VII)				65,750,000
	- Paket Meeting (fullday)	50	OH	490,000	24,500,000
	- Transport Peserta Rapat	60	OH	600,000	36,000,000
	- Uang Harian Rapat Fullday	50	OH	105,000	5,250,000
B	<i>Monitoring dan Koordinasi Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Keanekaragaman Hayati Tinggi</i>				162,090,000
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.182-Jakarta VII)				6,540,000
	- ATK	1	KEG	2,400,000	2,400,000
	- Konsumsi rapat (eselon II lain dan stakeholder lainnya)	60	OR/KL	69,000	4,140,000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.182-Jakarta VII)				119,550,000
	> Perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Inventarisasi dan Verifikasi Potensi Keanekaragaman Hayati Tinggi				119,550,000
	- Tiket dan Biaya Transportasi (1 orang x 15 kali)	15	OK	3,700,000	55,500,000
	- Biaya Penginapan (1 orang x 3 malam x 15 kali)	45	OHK	850,000	38,250,000
	- Uang Harian (1 orang x 4 hari x 15 kali)	60	OHK	430,000	25,800,000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.182-Jakarta VII)				36,000,000
	- Transport Peserta Rapat	60	OH	600,000	36,000,000
052	Registrasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi di luar Kawasan Konservasi				500,000,000
A	<i>Verifikasi Potensi Keanekaragaman Hayati Tinggi</i>				137,600,000

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Vol	Sat	Harga Sat	Jumlah Biaya
521211	<u>Belanja Bahan</u>				24,320,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- ATK	1	KEG	3,180,000	3,180,000
	- Personal Use	60	UNIT	200,000	12,000,000
	- Pencetakan buku Inver	50	EKS	100,000	5,000,000
	- Konsumsi rapat (eselon II lain dan stakeholder lainnya)	60	OR/KL	69,000	4,140,000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>				8,200,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honor Moderator / Fasilitator non KLHK	4	OK	700,000	2,800,000
	- Honor Narasumber non KLHK	6	OJ	900,000	5,400,000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>				30,080,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	> Perjalanan dinas dalam rangka Verifikasi Potensi Keanekaragaman Hayati Tinggi				30,080,000
	- Tiket dan Biaya Transportasi (1 orang x 4 kali)	4	OK	3,250,000	13,000,000
	- Biaya Penginapan (1 orang x 3 malam x 4 kali)	12	OHK	850,000	10,200,000
	- Uang Harian (1 orang x 4 hari x 4 kali)	16	OHK	430,000	6,880,000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>				75,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting (fullday)	50	OH	495,000	24,750,000
	- Transport Peserta Rapat	75	OH	600,000	45,000,000
	- Uang Harian Rapat Fullday	50	OH	105,000	5,250,000
B	<i>Penyusunan Data Potensi Keanekaragaman Hayati Tinggi</i>				155,600,000
521211	<u>Belanja Bahan</u>				42,320,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- ATK	1	KEG	2,180,000	2,180,000
	- Personal Use	60	UNIT	200,000	12,000,000
	- Pencetakan Buku Register	30	BUKUOR/KL	800,000	24,000,000
	- Konsumsi rapat (eselon II lain dan stakeholder lainnya)	60	OR/KL	69,000	4,140,000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>				8,200,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honor Moderator / Fasilitator Non KLHK	4	OK	700,000	2,800,000
	- Honor Narasumber Non KLHK	6	OJ	900,000	5,400,000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>				30,080,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	> Perjalanan dinas dalam rangka Penyusunan Data Potensi Keanekaragaman Hayati Tinggi				30,080,000
	- Tiket dan Biaya Transportasi (1 orang x 4 kali)	4	OK	3,250,000	13,000,000
	- Biaya Penginapan (1 orang x 3 malam x 4 kali)	12	OHK	850,000	10,200,000

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Vol	Sat	Harga Sat	Jumlah Biaya
	- Uang Harian (1 orang x 4 hari x 4 kali)	16	OHK	430,000	6,880,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				75,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting (fullday)	50	OH	495,000	24,750,000
	- Transport Peserta Rapat	75	OH	600,000	45,000,000
	- Uang Harian Rapat Fullday	50	OH	105,000	5,250,000
C	Pengarusutamaan Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi				206,800,000
521211	Belanja Bahan				20,180,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- ATK	1	KEG	3,280,000	3,280,000
	- Personal Use	50	UNIT	200,000	10,000,000
	- Konsumsi rapat (eselon II lain dan stakeholder lainnya)	100	OR/KL	69,000	6,900,000
522151	Belanja Jasa Profesi				20,200,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honor Narasumber Non KLHK	8	OJ	900,000	7,200,000
	- Honor Moderator/Fasilitator	4	OK	700,000	2,800,000
	- Honor Narasumber Pakar/Ahli	6	OJ	1,700,000	10,200,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				55,920,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	> Perjalanan dinas dalam rangka Pengarusutamaan Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi				55,920,000
	- Tiket dan Biaya Transportasi (1 orang x 8 kali)	8	OK	4,000,000	32,000,000
	- Biaya Penginapan (1 orang x 2 malam x 8 kali)	16	OHK	850,000	13,600,000
	- Uang Harian (1 orang x 3 hari x 8 kali)	24	OHK	430,000	10,320,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				35,500,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting (fullday)	50	OH	430,000	21,500,000
	- Transport Peserta Rapat	50	OH	150,000	7,500,000
	- Uang Harian Rapat Fullday	50	OH	130,000	6,500,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota				75,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting (fullday)	50	OH	495,000	24,750,000
	- Transport Peserta Rapat	75	OH	600,000	45,000,000
	- Uang Harian Rapat Fullday	50	OH	105,000	5,250,000
029.05.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				3,500,000,000
6742	Pemulihan Ekosistem				3,500,000,000
6742.ABV	Kebijakan Bidang Kehutanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian			3,500,000,000
	Lokasi : DKI JAKARTA				

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Vol	Sat	Harga Sat	Jumlah Biaya
6742.ABV. 001	Kebijakan Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi dan ABKT	1.0 Rekomendasi Kebijakan			3,500,000,000
051	Penyusunan Kebijakan Pemulihan Ekosistem				3,500,000,000
A	<i>Penyusunan / Reviu NSPK Pemulihan Ekosistem</i>				200,000,000
521211	<u>Belanja Bahan</u>				23,880,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- ATK	1	KEG	3,360,000	3,360,000
	- Personal Use	50	UNIT	200,000	10,000,000
	- Konsumsi rapat (eselon I lain dan stakeholder lainnya)	80	OR/KL	69,000	5,520,000
	- Pencetakan	100	EKS	50,000	5,000,000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>				20,200,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honor Moderator Non KLHK	4	OK	700,000	2,800,000
	- Honor Narasumber Non KLHK	8	OJ	900,000	7,200,000
	- Honor Narasumber/Pakar/Ahli non KLHK	6	OJ	1,700,000	10,200,000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>				59,920,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	> Perjalanan Dinas dalam rangka Penyusunan / Reviu NSPK Pemulihan Ekosistem				59,920,000
	- Tiket dan Biaya Transportasi (1 orang x 8 kali)	8	OK	4,200,000	33,600,000
	- Biaya Penginapan (1 orang x 2 malam x 8 kali)	16	OHK	1,000,000	16,000,000
	- Uang Harian (1 orang x 3 hari x 8 kali)	24	OHK	430,000	10,320,000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>				96,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting (fullday)	60	OH	495,000	29,700,000
	- Transport Peserta Rapat	100	OH	600,000	60,000,000
	- Uang Harian Rapat Fullday	60	OH	105,000	6,300,000
B	<i>Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem</i>				438,500,000
521211	<u>Belanja Bahan</u>				27,400,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- ATK	1	KEG	3,140,000	3,140,000
	- Personal Use	100	UNIT	200,000	20,000,000
	- Konsumsi rapat (eselon I lain dan stakeholder lainnya)	60	OR/KL	71,000	4,260,000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>				15,600,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honor Narasumber Non KLHK	6	OJ	900,000	5,400,000
	- Honor Narasumber Pakar / Ahli	6	OJ	1,700,000	10,200,000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>				226,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	> Perjalanan Dinas dalam rangka Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem				226,000,000

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Vol	Sat	Harga Sat	Jumlah Biaya
	- Tiket dan Biaya Transportasi (1 orang x 20 kali)	20	OK	6,000,000	120,000,000
	- Biaya Penginapan (1 orang x 3 malam x 20 kali)	60	OHK	1,100,000	66,000,000
	- Uang Harian (1 orang x 4 hari x 20 kali)	80	OHK	500,000	40,000,000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>				169,500,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting (fullday)	200	OH	495,000	99,000,000
	- Transport Peserta Rapat	100	OH	600,000	60,000,000
	- Uang Harian Rapat Fullday	100	OH	105,000	10,500,000
C	<i>Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem</i>				916,000,000
521211	<u>Belanja Bahan</u>				67,300,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- ATK	1	KEG	4,250,000	4,250,000
	- Personal Use	200	UNIT	184,000	36,800,000
	- Konsumsi rapat (eselon I lain dan stakeholder lainnya)	350	OR/KL	75,000	26,250,000
522141	<u>Belanja Sewa</u>				10,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Kendaraan	5	UNIT	2,000,000	10,000,000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>				10,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honor Moderator/Fasilitator Non KLHK	2	OK	700,000	1,400,000
	- Honor Narasumber Non KLHK	2	OJ	900,000	1,800,000
	- Honor Narasumber Pakar / Ahli	4	OJ	1,700,000	6,800,000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>				660,100,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	> Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dan Sosialisasi Pemulihan Ekosistem				660,100,000
	- Tiket dan Biaya Transportasi (1 orang x 46 kali)	46	OK	9,030,000	415,380,000
	- Biaya Penginapan (1 orang x 3 malam x 46 kali)	138	OHK	1,000,000	138,000,000
	- Uang Harian (1 orang x 4 hari x 46 kali)	184	OHK	580,000	106,720,000
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>				42,600,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting (fullday)	60	OH	430,000	25,800,000
	- Transport Peserta Rapat	60	OH	150,000	9,000,000
	- Uang Harian Rapat Fullday	60	OH	130,000	7,800,000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>				126,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting (fullday)	80	OH	495,000	39,600,000
	- Transport Peserta Rapat	130	OH	600,000	78,000,000
	- Uang Harian Rapat Fullday	80	OH	105,000	8,400,000

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Vol	Sat	Harga Sat	Jumlah Biaya
D	<i>Pemulihan Ekosistem dalam rangka Dukungan untuk HKAN 2023</i>				355,500,000
521211	<u>Belanja Bahan</u>				127,900,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- ATK	1	KEG	3,760,000	3,760,000
	- Personal Use	100	UNIT	200,000	20,000,000
	- Konsumsi rapat (eselon I lain dan stakeholder lainnya)	60	OR/KL	69,000	4,140,000
	- Dukungan pelaksanaan kegiatan penanaman dalam rangka HKAN	1	KEG	50,000,000	50,000,000
	- Pencetakan bahan promosi	1	KEG	50,000,000	50,000,000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>				8,600,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honor Narasumber Pakar / Ahli	4	OJ	1,700,000	6,800,000
	- Honor Narasumber Non KLHK	2	OJ	900,000	1,800,000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>				153,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	> Perjalanan Dinas dalam rangka Pemulihan Ekosistem dalam rangka Peringatan HKAN				153,000,000
	- Tiket dan Biaya Transportasi (1 orang x 10 kali)	10	OK	8,400,000	84,000,000
	- Biaya Penginapan (1 orang x 4 malam x 10 kali)	40	OHK	1,000,000	40,000,000
	- Uang Harian (1 orang x 5 hari x 10 kali)	50	OHK	580,000	29,000,000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>				66,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting (fullday)	30	OH	495,000	14,850,000
	- Transport Peserta Rapat	80	OH	600,000	48,000,000
	- Uang Harian Rapat Fullday	30	OH	105,000	3,150,000
E	<i>Verifikasi Data dan Informasi Hasil Pemulihan Ekosistem</i>				636,000,000
521211	<u>Belanja Bahan</u>				61,900,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- ATK	1	KEG	4,380,000	4,380,000
	- Konsumsi rapat (eselon I lain dan stakeholder lainnya)	80	OR/KL	69,000	5,520,000
	- Personal Use	100	UNIT	200,000	20,000,000
	- Pencetakan Buku Peta Hasil Pemulihan Ekosistem	40	BUKU	800,000	32,000,000
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>				9,200,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Honor Moderator Non KLHK	8	OK	700,000	5,600,000
	- Honor Narasumber Non KLHK	4	OJ	900,000	3,600,000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>				337,500,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	> Perjalanan Dinas dalam rangka Verifikasi Data dan Informasi Hasil Pemulihan Ekosistem				337,500,000

Kode	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Vol	Sat	Harga Sat	Jumlah Biaya
	- Tiket dan Biaya Transportasi (1 orang x 30 kali)	30	OK	5,950,000	178,500,000
	- Biaya Penginapan (1 orang x 3 malam x 30 kali)	90	OHK	1,100,000	99,000,000
	- Uang Harian (1 orang x 4 hari x 30 kali)	120	OHK	500,000	60,000,000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>				227,400,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting (fullday)	200	OH	495,000	99,000,000
	- Transport Peserta Rapat	200	OH	600,000	120,000,000
	- Uang Harian Rapat Fullday	80	OH	105,000	8,400,000
F	<i>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem</i>				954,000,000
521211	<u>Belanja Bahan</u>				7,500,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- ATK	1	KEG	3,000,000	3,000,000
	- Konsumsi rapat (eselon I lain dan stakeholder lainnya)	60	OR/KL	75,000	4,500,000
521711	<u>Belanja Kontribusi pada Organisasi Internasional dan Trust Fund</u>				500,000,000
	- Pembayaran Kontribusi pada Organisasi Internasional (OI) Konvensi RAMSAR	1	THN	500,000,000	500,000,000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>				300,500,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	> Perjalanan Dinas dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem				300,500,000
	- Tiket dan Biaya Transportasi (1 orang x 25 kali)	25	OK	6,700,000	167,500,000
	- Biaya Penginapan (1 orang x 3 malam x 25 kali)	75	OHK	1,000,000	75,000,000
	- Uang Harian (1 orang x 4 hari x 25 kali)	100	OHK	580,000	58,000,000
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>				96,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Paket Meeting (fullday)	60	OH	495,000	29,700,000
	- Uang Harian Rapat Fullday	60	OH	105,000	6,300,000
	- Transport Peserta Rapat	100	OH	600,000	60,000,000
524211	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri</u>				50,000,000
	(KPPN.182-Jakarta VII)				
	- Perjalanan dinas rangka Dukungan substansi ecosystem restoration dalam pencapaian global target biodiversity post 2020	1	OT	50,000,000	50,000,000